

Terbit : 28 Oktober 2023

Manajemen Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Data Di Unit Layanan Dinas Disdukcapil Kota Medan

¹Putri Agustina, ²Nurbaiti

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: 1agustinaputri564@gmail.com, 2nurbaiti@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Disdukcapil Kota Medan merupakan satuan pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan bantuan masyarakat di bidang organisasi kependudukan, salah satunya administrasi di bidang kartu keluarga dan kartu karakter. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bantuan dari pengurus organisasi dalam menawarkan bantuan jenis ini kepada daerah setempat. Teknik pemeriksaan ini menggunakan strategi eksplorasi yang jelas dengan metodologi subjektif. Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengetahui pelaksanaan administrasi publik berdasarkan informasi dari pimpinan di Unit Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Umum Kota Medan. Penting untuk memastikan bahwa informasi kependudukan dan pendaftaran umum yang diawasi oleh unit ini akurat, solid, dan dapat diakses secara efektif oleh masyarakat luas. Kerangka dewan informasi yang terkoordinasi dan terpadu untuk menjamin informasi kependudukan dan registrasi umum yang diawasi oleh unit tersebut dapat diakses secara efektif dan cepat oleh masyarakat umum.

Kata Kunci: *Manajemen, Pelayanan Publik, Manajemen Data*

PENDAHULUAN

Cabang Kependudukan dan Pendaftaran Umum merupakan salah satu lembaga dalam melaksanakan kemandirian wilayah, dalam memberikan bantuan pada acara-acara penting kemasyarakatan. Jika kita menilik Peraturan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dikatakan bahwa daerah yang mandiri mempunyai kekuasaan dan kesanggupan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan pedoman yang membawahnya. Dari sini dapat dikatakan bahwa Administrasi Kependudukan dan Pendaftaran Umum penting bagi pemerintah provinsi yang mempunyai komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya mengenai perangkat keras organisasi kependudukan. Apalagi dengan Administrasi Kependudukan dan Pendaftaran Umum yang mempunyai tugas memberikan bantuan dalam perencanaan atau penyelesaian setiap acara kemasyarakatan.

Pedoman Bantuan Publik merupakan prinsip-prinsip administrasi yang harus diberikan oleh otoritas publik kepada daerah setempat. Hadirnya prinsip-prinsip bantuan publik akan menjamin tersedianya layanan dasar yang dapat diperoleh daerah setempat. Oleh karena itu, penting untuk membangun budaya pembangunan dan imajinasi dalam asosiasi atau yayasan publik yang menawarkan bantuan publik. Peningkatan pembangunan sesuai kebutuhan daerah setempat dan klien instrumen administrasi

untuk menawarkan dukungan terbaik. Kemajuan dan imajinasi secara terbuka pelayanan dapat meningkatkan dan mempercepat pelayanan yang diberikan, sehingga memberikan kesan kepuasan bagi penerima manfaat pelayanan.

Administrasi organisasi kependudukan meliputi pencatatan peristiwa kependudukan, khususnya pencatatan wasiat kelahiran, pencatatan pernyataan kematian, kartu identitas penghuni, kartu keluarga dan pengakuan anak. Namun disini penulis hanya membatasi urusan pelayanan kependudukan pada urusan pembuatan 3 akta kelahiran saja, karena perkembangan akta kelahiran di Indonesia masih sangat timpang dan masih banyak kendala seperti dalam hal bantuan. dan adanya biaya yang melebihi biaya pembuatan autentikasi kelahiran. Hal inilah yang menjadi pemicu timpangnya pemenuhan wasiat kelahiran (Yunita, 2023, pp. 1–3).

Standar nilai administrasi publik adalah: partisipatif, lugas, responsif, tidak memihak, sederhana dan sederhana, sukses dan produktif, terbuka, bertanggung jawab dan adil. Pedoman yang partisipatif meliputi daerah dalam mengatur pemerintahan, aturan yang lugas memberikan keleluasaan masuk ke daerah setempat, responsif artinya reseptif terhadap permintaan kebutuhan daerah setempat, non-opresif artinya tidak memisahkan pemerintahan berdasarkan kepribadian individu, sederhana dan sederhana artinya tidak menyulitkan daerah setempat, menarik dan produktif artinya bantuan dilakukan dengan biaya yang paling minimal, terbuka berarti tersedia secara efektif bagi daerah setempat, bertanggung jawab berarti sarat tanggung jawab, adil berarti mempermudah segala sesuatunya pertemuan yang kurang beruntung. Bantuan yang berkualitas mutlak menjamin terpenuhinya anggapan masyarakat terhadap kepentingan umum, serta mendorong terbangunnya harmonisasi antarlembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pakar publik berupaya meningkatkan kepercayaan publik dengan mencari intisari implementasi kebijakan sebagaimana dianggap normal untuk menjawab kebutuhan publik akan administrasi yang baik, khususnya dengan menerapkan struktur model yang layak. Model sejatinya adalah peluang Penguatan Penyelenggaraan Negara dan Perubahan Peraturan dengan memberikan Penetapan Nomor 191 Tahun 2016 tentang Pembentukan 59 Pedoman Sipil/Kelompok Masyarakat sebagai Model Asli Penyelenggaraan Organisasi Umum, dan itu berarti menikam intisari dari organisasi untuk melihat organisasi yang luar biasa (Darmawan, 2020, p. 2).

Meskipun penyelenggaraan pemerintahan di segala bidang belum baik, namun, otoritas publik telah melakukan beberapa perbaikan, baik melalui berbagai teknik atau dengan melakukan perbaikan administratif yang sepenuhnya ditujukan untuk menangani pengenalan afiliasi pemerintah dan dilakukan dengan alat negara pada umumnya (Musyafaah & Wijaya, 2020, p. 253).

Unsur-unsur administrasi publik di Indonesia tentunya menjadi bahan perbincangan dalam pengelolaan organisasi. Gejala yang begitu dahsyat adalah keragaman dan kepribadian tersendiri dalam tubuh pemerintahan. Sesuai Pedoman Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara Pasal 1 Ayat 1, “pengelolaan kebijakan adalah pelaksanaan atau serangkaian pemuasan kebutuhan bantuan yang ditunjukkan oleh aturan-aturan yang sah bagi setiap penduduk dan penghuni sehubungan dengan produk, organisasi, dan pedoman penyelenggaraan yang diberikan oleh Pemerintah. membantu fasilitator daerah setempat”. Banyak persoalan dan kejadian yang menimpa pemerintah yang membahas adanya anomali pada organ pengatur dengan patologi yang berbeda-beda, lucu tentunya namun faktanya adalah memberikan gambaran kepada publik bahwa hal itulah yang menimpa organ administratif. “Organisasi yang ideal adalah organisasi yang bergantung pada kerangka dan pedoman yang bijaksana, dan tidak bergantung pada paternalisme, kekuasaan, dan magnetisme” (Max Weber, 1922). Kemampuan otoritas publik dalam memberikan bantuan sangat lengkap. Drain dan Davis (1996) membaginya menjadi tiga kemampuan, yaitu: “Pertama, kemampuan asuransi publik, merupakan layanan yang berkaitan dengan kebutuhan mendasar manusia untuk menjawab peristiwa-peristiwa penting; kedua, kemampuan sistem esensial, adalah layanan yang diberikan oleh otoritas publik terkait dengan kebutuhan dasar; ketiga, kemampuan ekologi individu dan lingkungan, adalah layanan untuk

mengatasi permasalahan masyarakat lokal seperti layanan ramah, iklim yang ramah, iklim yang ramah, pengumpulan sampah, pendidikan, kesejahteraan, penginapan dan perhentian. Pada tingkat Pemerintahan Teritorial diusahakan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka sesuai dengan kenyamanan badan publik dan status sah formal dalam suatu ruang terpenuhi sesuai pedoman hukum seperti Pedoman Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Bagian III Pasal 3 Ayat 1 “Setiap penghuni mempunyai pilihan untuk memperoleh arsip kependudukan dan mendapatkan administrasi serupa dalam pendaftaran kependudukan, pendaftaran umum dan keyakinan yang sah sehubungan dengan tanggung jawab yang dipegang”(Taufiq, 2022, p. 2).

Dalam menjalankan pemerintahan terbuka, lembaga legislatif daerah diberi kesempatan untuk merencanakan dan memutuskan sendiri jenis pemerintahan apa yang diperlukan oleh daerah setempat. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah seharusnya dapat memberikan dukungan berkualitas tinggi kepada jaringan lingkungan untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan daerah. Sifat bantuan luar biasa yang dimaksud adalah penyelenggaraan yang mendekatkan kewenangan publik kepada daerah. Hal ini diwujudkan dengan mengetahui dan memilah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, kemudian menghasilkan sistem bantuan yang baik (Gafar, 2021, p. 129).

Sejak dilaksanakannya kemerdekaan daerah, administrasi publik menjadi semakin diperhatikan, dengan mempertimbangkan bahwa manajemen kebijakan merupakan salah satu elemen penentu keberhasilan pelaksanaan kebebasan teritorial. Apabila pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah provinsi bagus/berkualitas, maka penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan dapat benar-benar berhasil. Karena organisasi adalah hal utama dan kunci dari alat ini, baik sebagai pegawai pemerintah maupun otoritas teritorial. Membangun kembali kehadiran asosiasi publik telah menjadi isu akhir-akhir ini, terutama setelah banyak keluhan dari klien administrasi menyatakan bahwa pameran asosiasi publik adalah sumber kemalasan, paksaan dan kegagalan. Gambaran asosiasi publik di negara-negara agraris, termasuk Indonesia, dalam melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan sangatlah disayangkan jika dibandingkan dengan asosiasi swasta. Dengan cara ini, tidak seperti biasanya asosiasi swasta sering kali digunakan sebagai pilihan strategi elektif untuk menentukan berbagai isu dalam penyelenggaraan administrasi publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan untuk bekerja keras dalam upaya mereka untuk memberikan bantuan kepada daerah setempat. Secara umum pelaksanaan kemandirian daerah adalah untuk memberdayakan daerah, efektif mendorong semangat dan inovasi daerah, serta meningkatkan kinerja dan kemampuan DPRD.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kajian Teori

1) Manajemen

Manajemen merupakan pusat suatu organisasi, karena eksekutif merupakan aparat pelaksana utama organisasi. Pemahaman otoritas dewan mengenai hal tersebut disepakati, termasuk yang dikemukakan oleh Gibson dan Donelly dan Ivancevich dalam buku Ratmanto, mencirikan para eksekutif sebagai berikut: “Suatu siklus yang dilakukan oleh setidaknya satu orang untuk memfasilitasi latihan yang berbeda untuk mencapai hasil yang dapat dicapai”. Hal ini tidak akan tercapai jika seseorang melakukan demonstrasi sendiri (Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005) (Juhananda et al., 2021, p. 13)

2) Manajemen Pelayanan

Menurut Moenir (2006), manajemen pelayanan adalah pengurus proses, tepatnya bagian dewan yang mengendalikan dan mengarahkan siklus bantuan, sehingga nantinya kerangka pergerakan dalam bantuan dapat berjalan secara terorganisir dan lancar dan juga dapat berada di jalur yang benar dan memberikan kepuasan kepada setiap individu yang

mendapatkannya. melayani. Selain itu, penilaian lain dari Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:4) mengenai dukungan dewan yang dipahami adalah suatu rangkaian siklus dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keahlian untuk mempunyai pilihan merencanakan mediasi, melaksanakan syafaat yang ada, koordinasikan dan selesaikan latihan yang ada. administrasi untuk mencapai semua tujuan yang diantisipasi dalam bantuan (Susiloadi & Kartika, 2022, p. 105).

3) **Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Standar kinerja ini juga dapat digunakan untuk mensurvei pameran organisasi pemerintah di dalam dan jarak jauh. Prinsip-prinsip prosedural di dalam ini disebut SOP. Penyusunan SOP ini penting karena menjadi tolak ukur dalam menilai kelayakan dan produktivitas pameran organisasi pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Secara bijaksana, teknik dicirikan sebagai langkah-langkah dengan berbagai arah yang masuk akal untuk menghasilkan siklus yang ideal. Siklus yang ideal adalah sebagai kerangka proses kerja klien sebagai latihan, aliran informasi dan proses kerja. Sistem fungsional standar adalah serangkaian langkah standar - berbagai arah masuk akal yang harus diselesaikan sebagai latihan, aliran informasi, dan proses kerja. Berdasarkan kemampuannya, kemampuan SOP untuk menyusun kerangka kerja dan proses kerja yang metodis, tertib dan bertanggung jawab; menggambarkan bagaimana tujuan kerja diselesaikan sesuai strategi dan pedoman yang relevan; memahami bagaimana cara paling umum dalam melaksanakan latihan terjadi; untuk meminta pelaksanaan dan pengorganisasian pekerjaan sehari-hari sesuai strategi yang telah ditetapkan; memastikan konsistensi dan ketepatan proses kerja; terlebih lagi menjabarkan hubungan yang proporsional antar unit kerja (R. Siburian & Kurniawati, 2020, p. 5).

4) **Pelayanan Publik**

Untuk dapat mengevaluasi sifat administrasi publik yang diberikan oleh otoritas pengatur, penting untuk memiliki standar berlapis yang menunjukkan apakah bantuan publik yang diberikan dapat dianggap menguntungkan atau tidak. Penilaian kualitas administrasi tidak ditentukan oleh koperasi spesialis tetapi sebenarnya lebih ditentukan oleh klien bantuan, dalam hal ini daerah setempat. (Pasya et al., 2022, p. 479).

5) **Pengelolaan Data Disdukcapil**

Struktur informasi dewan Seperti yang ditunjukkan oleh Barry E. Cushing, sistem informasi manajerial adalah kumpulan sumber daya manusia dan modal dalam suatu afiliasi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menangani data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi semua tingkatan dewan dalam memilah-milah dan mengendalikan pelatihan. (Nugraha dkk., 2010). Mengingat Peraturan Penyelenggaraan Kependudukan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perkumpulan Kependudukan, Klarifikasi Perkumpulan Kependudukan merupakan penyempurnaan dari latihan penyusunan dan pengendalian sebaran Laporan dan Data Kependudukan melalui Penyelenggaraan Kependudukan. Pendaftaran, Pendaftaran Umum, informasi dewan Asosiasi Penduduk dan pemanfaatan hasilnya untuk implementasi dan perbaikan kebijakan di berbagai bidang. Selain itu yang dimaksud dengan Sistem Informasi Perkumpulan Penduduk yang selanjutnya disingkat SIAK adalah suatu struktur informasi yang memanfaatkan inovasi informasi dan persuratan untuk bekerja sama dengan organisasi informasi Perkumpulan Penduduk pada tingkat pengaturan dan pelaksanaan bantuan sebagai satu kesatuan (Jaya et al., 2021, p. 399).

2. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembuatan e-KTP di Kantor Disdukcapil Kota Medan bisa dibilang luar biasa. Hal ini harus dilihat dengan adanya pedoman/landasan yang jelas dalam memperhatikan pemanfaatan e-KTP di Kota Medan yang

menggunakan alasan yang sah, sosialisasi dibantu melalui pengungkapan data yang baik dalam pelaksanaan pembuatan e-KTP berbasis NIK. -KTP bagi penduduk sekitar wilayah Kota Medan (Syahputri, 2023, p. 166). Kerangka penyusunannya dimulai dengan menganalisis apa yang terjadi, menetapkan tujuan, menentukan massa, dan menentukan media. Penggunaan filosofi korespondensi Disdukcapil Kota Medan dalam program e-KTP menggabungkan dua metodologi, yaitu korespondensi sangat dekat ke rumah dan korespondensi media.

Peneliti mengatakan bahwa Badan Kependudukan Kota Medan sebenarnya memerlukan dukungan pemrograman hingga peralatan karena akan mempengaruhi terlaksananya server struktur informasi kependudukan. Dengan asumsi pemeliharaan server terlibat, penerbitan akta kelahiran dan kartu keluarga dapat selesai dalam waktu 5 hari atau kurang. Kemudian pengaturan yang lazim dan biasa dalam pelaksanaan SIAK dengan adaptasi terkini bagi staf delegasi agar pekerjaannya lebih berkesan dan bermanfaat. (Tridyanthi & Nurbaiti, 2022, p. 856). Mengingat hal ini, pakar publik menggantinya dengan teknik yang berbeda. Metodologi baru ini juga menjawab semua kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan data publik. Untuk membantu berbagai posisi dalam pendaftaran penduduk sesuai peraturan penting, pakar publik menerapkan berbagai metode, yaitu Sistem Informasi Perkumpulan Penduduk (SIAK).

Peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas Layanan Aspirasi Peengaduan Online Rakyat (LAPOR) elektronik belum berfungsi dengan baik. Hal ini terlihat dari pandangan umum bahwa waktu yang diberikan oleh para pakar terbuka untuk memperoleh laporan masih sangat lama, selain itu sosialisasi yang dilakukan juga masih kurang menarik (Silaban & P. M, 2023, p. 233). Hal ini terlihat dari banyaknya waktu yang diberikan oleh para spesialis terbuka untuk menentukan keluhan di masa depan. Pendistribusian LAPOR secara langsung ke lingkungan sekitar belum pernah dilakukan oleh Disdukcapil Kota Medan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian deskripsi adalah gambaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang status atau dampak samping mengenai suatu populasi atau wilayah tertentu, atau untuk merencanakan realitas berdasarkan sudut pandang (pandangan tertentu pada saat penelitian diarahkan). (K, 2018, p. 1).

Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti ini adalah strategi ujian yang mencerahkan dengan metodologi subjektif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan subjek pemeriksaan sebagai sumber data berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Informasi subjektif memberikan dan menunjukkan sifat objek pemeriksaan yang diselesaikan. Dalam pengujian kali ini, penulis secara langsung melihat kepiawaian Disdukcapil Kota Medan dalam menyediakan data yang akurat mengenai bantuan masyarakat kepada para pengelola informasi di dewan untuk mewujudkan administrasi yang baik.

Penyusunan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan fenomena yang terjadi pada lingkungan dan factual asli yang muncul dengan mengumpulkan informasi mengenai suatu objek penelitian. Selain itu, penulisan ilmiah ini juga mengumpulkan informasi melalui indeks google scholars dan website garuda kemendikbud.

PEMBAHASAN

Manajemen pelayanan publik pada pengelolaan data di unit pelayanan Disdukcapil Kota Medan Penting untuk memastikan bahwa informasi populasi dan pendaftaran umum yang diawasi oleh unit ini

akurat, solid, dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat umum. Beberapa hal yang harus dapat dilakukan secara terbuka oleh pengurus administrasi dalam memberikan informasi kepada pimpinan di lingkungan unit administrasi Disdukcapil Kota Medan antara lain:

- 1) Melaksanakan kerangka pelaksana informasi yang terkoordinasi dan terpadu untuk menjamin bahwa informasi kependudukan dan pendaftaran umum yang diawasi oleh unit dapat diakses secara efektif dan cepat oleh masyarakat pada umumnya.
- 2) Memimpin pelatihan dan peningkatan kemampuan pegawai unit administrasi untuk menjamin mempunyai informasi dan kemampuan yang memadai dalam mengawasi informasi kependudukan dan pendaftaran umum.
- 3) Menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terstandarisasi dalam pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil untuk memastikan bahwa proses pengelolaan data tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif.
- 4) Melakukan audit dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang diterapkan oleh unit pelayanan untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan baik dan dapat ditingkatkan jika diperlukan.

Dalam pelayanan publik, manajemen yang baik sangat penting untuk mengelola data di Disdukcapil kota Medan. Berikut adalah beberapa analisis manajemen yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di dinas tersebut:

- 1) Pemeriksaan kebutuhan informasi: Dalam pengawasan informasi, masyarakat dan penyelenggara pendaftaran umum Kota Medan perlu melakukan pemeriksaan kebutuhan informasi untuk menentukan jenis informasi yang diperlukan, sumber informasi, dan cara mengumpulkan informasi. Hal ini akan membantu departemen dalam mengawasi informasi dengan lebih nyata dan efektif.
- 2) Pemeriksaan bahaya: Dalam mengawasi informasi, masyarakat kota Medan dan administrasi pendaftaran umum perlu menyelesaikan pemeriksaan perjudian untuk mengenali potensi bahaya yang dapat terjadi pada informasi yang dibuat. Ini akan membantu kantor bermain aman untuk mengurangi pertaruhan.
- 3) Pemeriksaan kualitas informasi: Dalam pengawasan informasi, masyarakat kota Medan dan penyelenggara pendaftaran umum perlu melakukan pemeriksaan kualitas informasi untuk menjamin bahwa informasi yang diawasi tepat, lengkap dan solid. Hal ini akan membantu divisi dalam mengambil pilihan yang ideal berdasarkan informasi yang dapat diakses.
- 4) Investigasi keamanan informasi: Dalam pengawasan informasi, masyarakat Kota Medan dan administrasi pendaftaran umum perlu melakukan pemeriksaan keamanan informasi untuk menjamin bahwa informasi yang diawasi terlindungi dari bahaya keamanan, misalnya peretasan atau perampokan informasi. Hal ini akan membantu kantor dalam mengikuti klasifikasi informasi dan mencegah penyalahgunaan informasi.

Disdukcapil Kota Medan dapat menerapkan manajemen pelayanan pengelolaan data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data kependudukan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan data kependudukan, termasuk dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data tersebut.
- 2) Menggunakan teknologi informasi yang tepat untuk memudahkan pengelolaan data kependudukan, seperti sistem basis data terpusat dan aplikasi manajemen data.
- 3) Melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan dalam pengelolaan data kependudukan, termasuk dalam hal penggunaan teknologi informasi yang digunakan.

- 4) Menerapkan standar keamanan data yang ketat untuk melindungi data kependudukan dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan.
- 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data kependudukan dengan memberikan akses yang tepat kepada pihak yang berwenang dan memastikan bahwa data tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang ditentukan.
- 6) Dengan menerapkan manajemen pelayanan pengelolaan data yang baik, Disdukcapil Kota Medan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa data kependudukan yang dimiliki dapat digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah.

Dengan menerapkan manajemen pelayanan publik yang baik pada pengelolaan data di unit pelayanan Disdukcapil Kota Medan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh unit tersebut dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Bantuan masyarakat kepada para pengurus badan informasi di unit Administrasi Kependudukan dan Pendaftaran Umum Kota Medan sangat penting untuk menjamin bahwa informasi kependudukan dan pendaftaran umum yang diawasi oleh unit tersebut akurat, dapat diandalkan dan dapat diakses secara efektif oleh masyarakat umum. Suatu kerangka dewan informasi yang terkoordinasi dan terpadu untuk menjamin bahwa informasi kependudukan dan pendaftaran umum yang diawasi oleh unit dapat diakses secara efektif dan cepat oleh masyarakat umum.

Penyiapan dan peningkatan kemampuan pegawai unit administrasi untuk menjamin mempunyai informasi dan kemampuan yang memadai dalam mengawasi informasi kependudukan dan pendaftaran umum. Sistem fungsional standar Investigasi keamanan informasi: Dalam mengawasi informasi, masyarakat kota Medan dan administrasi pendaftaran umum perlu melakukan pemeriksaan keamanan informasi untuk menjamin bahwa informasi yang diawasi terlindungi dari bahaya keamanan, misalnya peretasan atau perampokan informasi. Hal ini akan membantu departemen dalam menjaga privasi informasi dan mencegah penyalahgunaan informasi.

Administrasi Kependudukan dan Pendaftaran Umum Dengan melaksanakan pelayanan informasi kependudukan yang baik, Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Umum Kota Medan dapat menjalankan sifat administrasi publik dan menjamin bahwa informasi kependudukan yang dimilikinya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membantu daerah dan pemerintahan setempat.

Dengan melaksanakan bantuan publik yang besar kepada para pengurus di Badan Penerangan di Unit Administrasi Kependudukan dan Pendaftaran Umum Kota Medan, diyakini dapat membenahi sifat pelayanan publik yang diberikan oleh unit tersebut dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, A. Y. (2020). *Implementasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 191 Tahun 2016 Tentang Penetapan 59 Kabupaten/Kota Sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli S.* PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA.
- Gafar, M. (2021). Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. *Phinisi Integration Review*, 4(1), 128–135. <https://doi.org/10.26858/pir.v4i1.19378>

-
- Jaya, M., Rinaldi, H., & Heriyanto. (2021). Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dalam Rangka Optimalisasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8, 396–412.
- Juhananda, R., Hadiati, T. L., & Suparno. (2021). Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. *Jurnal Media Administrasi*, Vol. 6 No.(2), 31–55.
- K, A. (2018). *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen* (pp. 1–317). Gunadarma Ilmu. [http://repositori.iain-bone.ac.id/3/1/Berbagai Metodologi dalam Penelitian.pdf](http://repositori.iain-bone.ac.id/3/1/Berbagai%20Metodologi%20dalam%20Penelitian.pdf)
- Musyafaah, N. L., & Wijaya, A. (2020). Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 10(2), 251–274. <https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.2.251-274>
- Pasya, R. A., Rifa'i, M., & Azijah, D. N. (2022). Manajemen Pelayanan Publik Pada Pelaksanaan Program E-Ktp. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(12), 478–483.
- R. Siburian, S. L., & Kurniawati, L. (2020). *Magister Terapan Studi Pemerintahan Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2 3 Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. 3(1), 1–19.
- Silaban, Y., & P. M, R. K. (2023). Efektivitas Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Lapor) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 233. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1193>
- Susiloadi, P., & Kartika, G. P. (2022). Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul WhatsApp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 104–113. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v4i1.17313>
- Syahputri, S. A. (2023). *Strategi Pengelolaan Informasi Pengurusan Ktp Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan*. 5(1). [https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2006%0Ahttps://repository.uisu.ac.id/bitstream/123456789/2006/3/Chapter I%20II.pdf](https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2006%0Ahttps://repository.uisu.ac.id/bitstream/123456789/2006/3/Chapter%20II.pdf)
- Taufiq, M. & I. T. (2022). *KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASAR Muhammad Taufiq Universitas mbojo bima Taufik irfadat Universitas mbojo bima Dinamika pelayanan public di Indonesia memang menjadi buah bibir ketika selesai berurusan dengan birokrasi , carut marut yang begitu*. 19(1), 91–114.
- Tridyanthi, K. A., & Nurbaiti. (2022). Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 851–857.
- Yunita, R. (2023). *KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO KUALA (STUDI PELAYANAN TERHADAP AKTA KELAHIRAN)*. SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIEI).